

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berpedoman teguh pada UUD 1945 yang mana didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui Bersama Presiden Jokowi telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 pada Kamis, 14 November 2019 di Istana Negara Jakarta. DIPA tersebut merupakan operasionalisasi dari APBN 2020 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam APBN, terdapat daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

Secara garis besar, struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan. Adapun yang menjadi faktor penentu postur APBN adalah pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Pendapatan negara dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Melihat perkembangan ekonomi global dan realisasi penerimaan pajak 2019 yang hanya tumbuh 0.23 % dibandingkan 2018, maka salah satu strategi dalam tetap menjaga stabilisasi pertumbuhan ekonomi adalah dengan memastikan kualitas belanja

APBN 2020 benar-benar memiliki korelasi bagi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju. Peran strategis APBN 2020 dalam membangun pondasi Indonesia Maju melalui stabilisasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menandakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pajak mempunyai peranan yang penting bagi sebuah Negara, tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Semakin banyak yang dipungut maka semakin banyak infrastruktur yang dibangun. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat kab/kota. Penggolongan pajak di atas diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang –Undang No. 34 Tahun 2000.

Data tahun 2018, penerimaan pajak penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu :

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Tahun 2018 Di Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Tempat	Penerimaan Pajak
1	KPP Pratama Yogyakarta	84,76 %

2	KPP Pratama Sleman	86,73 %
3	KPP Pratama Wates	83,40 %
4	KPP Pratama Bantul	89,72 %
5	KPP Pratama Wonosari	76,20 %

(Sumber : krjogja.com)

Tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki wajib pajak orang pribadi sangatlah penting karena dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang baik akan membuat tujuan dari penerimaan daerah dapat tercapai sesuai target. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.

Menurut Kepatuhan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal tersebut wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal". Akan tetapi, sebagaimana yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan tidak sejalan dengan apa yang terjadi.

Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Hal itu dikarenakan wajib pajak kurang pengetahuan, informasi dan pembinaan tentang perpajakan dan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya sosialisasi pajak. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan variabel yang tidak konsisten, yaitu terdapat penelitian yang menyatakan bahwa variabel tersebut berhubungan secara signifikan namun terdapat ada penelitian lain yang menyatakan bahwa variabel tersebut tidak berhubungan secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian Venichia Qibtiasari (2020) pada variabel sosialisasi, kesadaran, dan sanksi berpengaruh positif. Sedangkan pada penelitian Stefani Siahaan (2018) pada variabel kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak namun pada variabel sosialisasi dan pelayanan pajak tidak berlaku.

Faktor yang selanjutnya yang mendorong kepatuhan pajak yaitu Budaya Menurut penelitian Asih & Adi (2020) pada variabel budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Utara. Sedangkan Menurut penelitian Luqman Yusuf (2017) pada variabel kesadaran

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak namun pada variabel budaya tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu di D.I. Yogyakarta khususnya Desa Tamanmartani dengan objek penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti memilih lokasi di Desa Tamanmartani karena wajib pajak orang pribadi masih rendah. Terlihat dari data penerimaan pajak PBB di Kabupaten Kalasan hanya sebesar 54% dan belum ada yang lunas pajak PBB. Kabupaten Kalasan terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Tamanmartani, Purwomartani, Selomartani dan Tirtomartani dengan jumlah wajib pajak ada 45.015 wajib pajak dengan baku utama PBB yakni sebesar 4.071.938.000. Peneliti memilih Desa Tamanmartani karena lokasi desa berada di perbatasan antara D.I.Yogyakarta dan Jawa Tengah sehingga jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tamanmartani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian kembali variabel-variabel yang belum konsisten dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi, Pelayanan, dan Budaya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Tamanmartani.”**

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Tamanmartani?

2. Apakah Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Tamanmartani?
3. Apakah Budaya Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Tamanmartani ?

1. 3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti akan membatasi pada Sosialisasi, Pelayanan, dan Budaya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini dilakukan di Desa Tamanmartani, Kalasan, Sleman, D. I. Yogyakarta pada tahun 2020.

1. 4. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Tamanmartani.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Tamanmartani.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Tamanmartani.

1. 5. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, baik peneliti, bagi KPP Pratama Sleman, wajib pajak maupun perkembangan ilmu ekonomi, bagi peneliti selanjutnya, terlebih dalam bidang perpajakan. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis.

Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang perpajakan serta mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya dibidang perpajakan.

2. Bagi Instansi Pajak / Kantor Pajak.

Bagi Instansi Pajak / Kantor Pajak Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, terutama terkait sosialisasi, pelayanan, dan budaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

3. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu bahan informasi yang dapat memperkaya wawasan untuk penelitian di masa yang akan datang dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian tentang perpajakan. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu

memberikan kejelasan tentang ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama masalah yang terkait dengan sosialisasi, pelayanan, dan budaya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Tamanmartani.

4. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa lainnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh sosialisasi, pelayanan, dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan menambah ilmu pengetahuan serta informasi mengenai perpajakan khususnya pada wajib pajak orang pribadi di Desa Tamanmartani.

5. Bagi wajib pajak.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayarkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan diketahuinya informasi terkait perpajakan maka penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Desa Tamanmartani.

1. 6. Sistematika Penulisan

Dalam laporan ini penulis menyajikan sistematika penulisan laporan penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menguraikan data yang diperoleh. Teori yang digunakan menjadi dasar dari penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian kemudian disebutkan di hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, tempat penelitian, jenis data yang digunakan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum dan Analisis Data

Bab ini membahas mengenai gambaran umum perpajakan Desa Tammmartani di KPP Sleman yang meliputi tujuan yang hendak dicapai, visi-misi lembaga, lokasi lembaga, kondisi fisik dan lingkungan lembaga, fasilitas, sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, tanggung jawab masing-masing bagian, dan analisis data yang dibandingkan dengan teori terkait.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan keterbatasan –keterbatasan dari hasil penelitian.

